

**COLLABORATIVE GOVERNANCE TATA KELOLA SAMPAH
DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Destia Monika Pramesti

NPP. 32.0426

*Asdaf Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : destiapramesti05@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : Waste management issues have become a serious challenge that impacts public order and environmental quality, particularly in Kudus Regency, Central Java Province. The Tanjungrejo Final Disposal Site (TPA) has exceeded its capacity. **Purpose :** This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in waste management in Kudus Regency. **Method :** This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and documentation. The Collaborative Governance theory by Ansell and Gash is used as an analytical framework, emphasizing the importance of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. **Results :** . The results show that collaboration between the Kudus Regency Government, private sector (such as PT. Djarum), and the community has been realized through various programs, such as waste banks and public education. However, several obstacles remain, including limited infrastructure, low public awareness, and weak cross-sector coordination. The government has made efforts to improve through regulatory strengthening, community involvement, and expansion of technological support for waste management. **Conclusion :** The conclusion of this study is that the implementation of collaborative governance in waste management in Kudus Regency has not been effective in maintaining public order, thus requiring stronger coordination and commitment among actors. The study contributes theoretically to environmental governance literature and provides policy recommendations for local government practices.

Keywords : Collaborative Governance, Waste Management Procedures, Public Order.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius yang berdampak terhadap ketertiban umum dan kualitas lingkungan, khususnya di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjungrejo mengalami kelebihan kapasitas sampah sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan collaborative governance dalam tata kelola sampah di Kabupaten Kudus. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teori Collaborative

Governance dari Ansell dan Gash digunakan sebagai pisau analisis, yang menekankan pada pentingnya kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus, sektor swasta seperti PT. Djarum, dan masyarakat telah diwujudkan melalui berbagai program, seperti bank sampah, dan edukasi publik. Namun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan sarana-prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan melalui penguatan regulasi, pelibatan komunitas, dan perluasan dukungan teknologi pengelolaan sampah. **Kesimpulan :** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus belum efektif dalam menjaga ketertiban umum, maka memerlukan penguatan pada aspek koordinatif dan komitmen antar aktor. Studi ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur tata kelola lingkungan serta rekomendasi kebijakan untuk praktik pemerintahan lokal.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Tata Kelola Sampah, Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan serius yang berdampak pada ketertiban umum dan kualitas lingkungan, khususnya di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. TPA Tanjungrejo sebagai satu-satunya tempat pembuangan akhir di daerah ini mengalami kelebihan kapasitas sejak lama (Pantura,2020). Kondisi ini mengakibatkan pencemaran lingkungan, seperti bau menyengat, genangan limbah yang merusak pertanian warga, dan tercemarnya Sungai Jati Pasean, yang berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 69,7 juta ton sampah pada 2023, dengan 33% di antaranya tidak dikelola dengan baik (Muhilisin, 2024). Kabupaten Kudus sendiri menghadapi tantangan serupa, di mana pengelolaan sampah mengalami penurunan efektivitas dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan sosial ini tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Labolo,2014). Upaya pemerintah daerah selama ini telah diarahkan melalui kebijakan berbasis kolaborasi, seperti pendekatan *Collaborative Governance* yang melibatkan sektor swasta (contohnya PT. Djarum), masyarakat, dan komunitas lokal. Beberapa inisiatif seperti program Bank Sampah, Busadipah (Buang Sampah Dapat Uang), serta program pengolahan sampah berbasis desa telah diimplementasikan. Namun, kolaborasi yang dibangun belum menunjukkan efektivitas optimal dalam menjaga ketertiban umum. Masih terdapat celah dalam sinergi antar aktor yang menyebabkan permasalahan sampah terus berulang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk kolaborasi yang diterapkan, mengidentifikasi hambatan, dan mengevaluasi upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam tata kelola sampah di Kabupaten Kudus.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, berbagai penelitian sebelumnya mengenai tata kelola sampah dengan pendekatan *collaborative governance* banyak dilakukan di berbagai daerah seperti Kota Ambon, Kota Palu, Kota Bekasi, dan Kabupaten Kampar. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada implementasi program pengelolaan sampah seperti bank sampah, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta kendala-kendala kolaborasi antara

pemangku kepentingan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam tata kelola sampah yang berorientasi langsung pada upaya menjaga ketertiban umum, khususnya di Kabupaten Kudus. Selain itu, studi yang menekankan pada keterlibatan PT. Djarum sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sampah di daerah ini, serta pendekatan berbasis lokal dan budaya (seperti kearifan lokal larangan menyembelih sapi) dalam konteks menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan pada bagaimana kolaborasi antar aktor lokal berlangsung dalam konteks tata kelola sampah untuk mendukung ketertiban umum, sekaligus memberikan rekomendasi strategis berbasis lokal yang belum banyak diangkat dalam penelitian sebelumnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memaparkan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek penelitian penulis. Untuk menjadi referensi dan memperkuat teori tentang penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menguraikan lima penelitian terdahulu yang memiliki variabel penelitian yang sama dan akan menunjukkan temuan serta perbedaan yang ada antara keduanya. Pertama, penelitian oleh Syifa Jauhairiah Mahendar (2024) yang berjudul *"Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku"* menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan teoritis yang sama serta fokus pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaannya adalah penelitian Syifa lebih menitikberatkan pada program bank sampah dan 3R, sedangkan penelitian ini imenekankan kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam konteks menjaga ketertiban umum secara luas di Kabupaten Kudus.

Kedua, Muhammad Candra Sulaiman (2024) dalam penelitiannya *"Collaborative Governance dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah"* juga memakai metode deskriptif kualitatif dan teori serupa. Persamaan ada pada analisis partisipasi multi-aktor, sedangkan perbedaannya adalah fokus Candra pada evaluasi bank sampah dan TPS3R di Kota Palu, sementara Destia menyoroti keterlibatan sektor swasta secara aktif seperti PT. Djarum dan pendekatan berbasis lokal.

Ketiga, penelitian oleh Resty Dwi Anjani (2023) berjudul *"Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat"* juga menggunakan metode dan teori yang sama. Persamaannya adalah kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Perbedaannya terletak pada unit analisis: Resty fokus pada Bank Sampah Induk Patriot sebagai strategi utama, sedangkan penelitian Destia lebih luas, menyentuh aspek edukasi publik, regulasi, serta peran budaya lokal dalam menjaga ketertiban umum.

Keempat, penelitian Lia Kusumaningrum dkk. (2023) berjudul *"Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup"* memiliki kedekatan geografis dengan penelitian Destia. Persamaannya mencakup pembahasan program 3R dan Busadipah. Namun, perbedaannya adalah fokus Lia hanya pada strategi Dinas PKPLH, tanpa menyoroti bentuk kolaborasi lintas aktor atau pengaruhnya terhadap ketertiban umum seperti yang dilakukan Destia.

Kelima, penelitian oleh Maya Dayana (2021) yang berjudul *"Kolaborasi Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar"* juga memakai metode deskriptif kualitatif dan teori Collaborative Governance. Persamaannya adalah sama-sama membahas peran stakeholders. Namun, berbeda dari penelitian Destia, fokus Maya lebih spesifik pada pengelolaan sampah rumah tangga dan menggarisbawahi kurangnya kemitraan konkret di

daerahnya. Sedangkan Destia menganalisis faktor keberhasilan dan penghambat kolaborasi dengan cakupan lebih luas di tingkat kabupaten.

Dengan demikian, kelima penelitian terdahulu memiliki benang merah berupa penggunaan teori Collaborative Governance dan metode kualitatif, namun berbeda dalam konteks lokasi, objek utama, serta fokus kolaborasi. Penelitian ini hadir sebagai pelengkap dengan penekanan pada keterkaitan pengelolaan sampah terhadap ketertiban umum serta mengintegrasikan kearifan lokal dan keterlibatan sektor swasta secara lebih komprehensif di Kabupaten Kudus.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat berbagai komponen yang saling berkesinambungan dengan apa yang diteliti oleh kelima peneliti tersebut termasuk dengan penelitian ini. Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah melalui pendekatan yang berbeda dari studi-studi terdahulu dalam ranah tata kelola sampah berbasis *collaborative governance*. Secara khusus, kebaruan terletak pada fokus penelitian terhadap sinergi antar aktor lokal di Kabupaten Kudus—yakni pemerintah daerah, sektor swasta (seperti PT. Djarum), dan masyarakat—dalam pengelolaan sampah sebagai strategi untuk menjaga ketertiban umum, bukan sekadar sebagai upaya pengendalian lingkungan semata.

Kebaruan lainnya adalah integrasi nilai-nilai budaya lokal, seperti larangan menyembelih sapi yang menjadi simbol sosial harmonis di Kabupaten Kudus, ke dalam kerangka kolaborasi pengelolaan sampah. Ini menunjukkan pendekatan sosiokultural dalam governance yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek teknokratis dan struktural semata.

Selain itu, penelitian ini mengkombinasikan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash dengan konsep kolaborasi Penta Helix serta praktik nyata program-program seperti *Busadipah*, bank sampah unit desa (BSU), dan pengelolaan TPA Tanjungrejo. Dengan pendekatan ini, penelitian bukan hanya menganalisis efektivitas kolaborasi, namun juga menyoroti keterkaitannya dengan ketertiban masyarakat secara langsung—sebuah topik yang masih langka dalam studi governance dan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam perluasan pemahaman *collaborative governance* berbasis lokalitas dan kontribusi praktis bagi tata kelola daerah yang ingin menjadikan kolaborasi lintas sektor sebagai solusi integratif dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi tata kelola sampah yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Kudus. Serta mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang menjadi kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi faktor penghambat kolaborasi tata kelola sampah di Kabupaten Kudus tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bentuk pelaksanaan *collaborative governance* dalam tata kelola sampah di Kabupaten Kudus, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menitikberatkan pada proses, dinamika, dan konteks kolaborasi antar aktor (Nurdin, 2019). Sumber data terdiri dari data primer

dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Satuan Polisi Pamong Praja, serta perwakilan dari PT. Djarum dan masyarakat sekitar TPA Tanjungrejo. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan pedoman wawancara sebagai alat bantu. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian berfokus di Kabupaten Kudus, khususnya pada kawasan sekitar TPA Tanjungrejo dan wilayah kerja instansi terkait, dengan waktu penelitian berlangsung selama periode tahun akademik 2023/2024. Teori collaborative governance dari Ansell dan Gash menjadi pisau analisis utama dalam menjelaskan dinamika dan proses kolaboratif yang terjadi antar pemangku kepentingan. (Sinurat, 2018) Pemilihan metode ini memberikan fleksibilitas untuk memahami realitas sosial secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kolaborasi tata kelola sampah di Kabupaten Kudus dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang meliputi empat dimensi utama: kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*). Penjabaran hasil dan pembahasan dilakukan berdasarkan tiga rumusan masalah utama.

3.1 Collaborative Governance Tata Kelola Sampah dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

Bentuk kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, sektor swasta (PT. Djarum), dan masyarakat telah diwujudkan dalam berbagai program seperti bank sampah unit desa, pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, serta program Busadipah (Buang Sampah di Bawah dengan Sampah) (Wachid, 2020). Kolaborasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan sampah berkelanjutan menuju target *Zero Waste Zero Emission* (ZWZE) tahun 2040.

1. Dimensi Starting Conditions

Kolaborasi dimulai dari kondisi awal yang tidak seimbang, terutama dalam hal sumber daya dan pengetahuan antar pelaku. Pemerintah dan pihak swasta memiliki keunggulan dalam kapasitas dan pengalaman, sedangkan masyarakat cenderung minim informasi dan keterampilan terkait pemilihan dan pengolahan sampah.

Dalam konsep ini, dijelaskan bahwa kondisi awal terdiri dari tiga indikator yang menggambarkan situasi tersebut, yaitu ketidakseimbangan sumber daya maupun perbedaan kemampuan antar stakeholders, insentif kolaborasi serta bagaimana riwayat konflik yang pernah dihadapi.

- a. Kondisi Sumber Daya Dalam hal tindak kolaboratif yang dilakukan oleh masing-masing sektor, pasti terdapat perbedaan dalam kualitas dan kuantitas yang dimilikinya. Maka, adanya pemahaman dari indikator ini berguna 80 untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas sumber daya dalam tindak kolaboratif ini.
- b. Insentif Pada indikator insentif, insentif disini sebagai benefit yang berarti keuntungan atau manfaat yang didapatkan oleh stakeholders yang terlibat dalam tindak kolaboratif ini. Peneliti mengacu pada ada atau tidaknya dorongan yang mendukung stakeholders untuk dapat berperan aktif dalam tindak kolaboratif yang terjadi.
- c. Ketakutan Konflik

Konflik yang pernah terjadi di masa lalu dapat memengaruhi pelaksanaan tindak kolaboratif kedepannya, karena pengalaman tersebut seringkali membentuk ketakutan terhadap potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan Riwayat konflik sebelumnya dan menciptakan kolaborasi yang saling percaya dan bergantung. Konflik dapat dilihat dari kendala atau keterbatasan yang muncul dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.

2. Dimensi Institutional Design

Terdapat upaya formal berupa peraturan daerah, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi landasan kelembagaan. Namun dalam praktiknya, desain kelembagaan masih menghadapi tantangan dari sisi konsistensi implementasi dan partisipasi lintas sektor yang belum merata.

a. Partisipasi antar sektor

Indikator ini menggambarkan forum bagi stakeholders untuk berinteraksi, dimana dalam forum tersebut kategori masing-masing pihak akan terlihat jelas. Setiap sektor baik dari pihak swasta maupun pemerintah Kabupaten Kudus memiliki peran masing-masing dimana keberhasilan dalam pengelolaan sampah ini harus saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sangat penting adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk terus berkembang agar tujuan masalah sampah selesai di tingkat desa dapat tercapai serta masyarakat merasakan lingkungan yang nyaman dan tentram kembali.

b. Aturan yang mengikat

Regulasi tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus dibuat untuk menjaga kenyamanan masyarakat dan ketertiban umum. Regulasi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan sampah serta penegakan peraturan tersebut apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tindak kolaboratif tata kelola sampah di Kabupaten Kudus

c. Transparansi

Indikator ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi, terkhusus dalam penegakan peraturan daerah. Dengan adanya perda yang jelas, pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pemerintah berharap transparansi ini mendorong kepatuhan terhadap aturan, sehingga kolaborasi antar pihak dapat berjalan secara efektif.

3. Dimensi Facilitative Leadership

Kepemimpinan fasilitatif terlihat dari peran Dinas PKPLH sebagai motor penggerak program kolaboratif. Namun, dukungan dari Satpol PP dalam menegakkan perda masih kurang optimal akibat keterbatasan personel dan fasilitas. Pemberdayaan Sumber Daya Aspek kepemimpinan merupakan unsur penting dalam mengantar pemangku kepentingan yang berkolaborasi dalam perundingan dan negosiasi untuk mengintegrasikan para pemangku kepentingan dan menyatukan dalam semangat kolaboratif.

4. Dimensi Collaborative Process

Proses kolaboratif sudah mencakup dialog antar pihak, tetapi masih minim dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Implementasi awal menunjukkan hasil, namun belum signifikan terhadap permasalahan utama seperti overkapasitas TPA Tanjungrejo yang masih mengganggu ketertiban umum.

a. Dialog Tatap Muka

Collaborative governance dimulai dari proses tatap muka antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan konsensus dengan tujuan akhir agar tercapai keuntungan bersama. Proses

tatap muka antar pemangku kepentingan ini dikatakan berjalan jika proses ini dilakukan secara rutin.

b. Pembangun Kepercayaan

Faktor kepercayaan dalam proses kolaborasi merupakan faktor penting agar terjalannya kolaborasi yang baik, bukan hanya mengenai negosiasi antar pemangku kepentingan saja, tetapi membangun kepercayaan Bersama.

c. Komitmen Kolaborasi

Komitmen merupakan salah satu aspek yang dapat mengatur keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kolaborasi. Komitmen untuk membangun kolaborasi agar pemangku kepentingan yang terlibat merasa memiliki terhadap tujuan yang diinginkan dan terjalannya kerjasama yang berkelanjutan.

d. Pemahaman Bersama

Proses kolaborasi membangun pemahaman bersama antara pemangku kepentingan merupakan hal penting untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap masalah, visi, misi, tujuan, ideologi bersama dan penyelarasan nilai-nilai inti dalam pengelolaan sampah.

3.2 Faktor Penghambat Collaborative Governance Tata Kelola Sampah dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan wawancara peneliti dengan berbagai informan dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak collaborative governance antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam pemilahan sampah. Banyak warga belum memahami pentingnya memilah sampah organik dan anorganik secara konsisten.

2. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana

Fasilitas pendukung seperti TPS, armada pengangkut, dan mesin pengolah sampah masih belum mencukupi, yang menghambat efektivitas pelaksanaan.

3. Keterbatasan Anggaran Dana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat penyalahgunaan skala prioritas penggunaan dana sehingga berdampak buruk seperti sekarang ini menyebabkan alokasi anggaran tidak tepat sasaran dan berdampak pada berbagai aspek pembangunan.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi tantangan yang besar dalam menciptakan tata kelola sampah yang berkelanjutan dan tertib. Jumlah personil yang tersedia belum sebanding dengan beban kerja yang kompleksitas tugas yang semakin meningkat. Kekurangan sumber daya manusia ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan

5. Lemahnya

Penegakan

Hukum

Satpol PP sebagai penegak Perda belum optimal karena keterbatasan SDM dan sarana operasional. Hal ini membuat pelanggaran, seperti pembuangan sampah liar, masih marak.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus mengatasi Faktor Penghambat Collaborative Governance Tata Kelola Sampah dalam Menjaga Ketertiban Umum di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi, terutama dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga dari hal tersebut, mengakibatkan polemik di masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum. Walaupun semua pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta dan juga masyarakat 114 sudah berkontribusi dalam menyelesaikan pengelolaan sampah ini, pemerintah harus tetap meningkatkan beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kolaborasi pada saat ini agar kedepannya lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola sampah di Kabupaten Kudus

Pemerintah Kabupaten Kudus telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk mengatasi hambatan kolaborasi tata kelola sampah, antara lain:

1. Revisi Dan Penataan Regulasi
Pemerintah tengah menata ulang regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan volume sampah dan memberikan sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran.
2. Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui sosialisasi langsung, penyuluhan, media sosial, dan penyebaran brosur tentang pemilahan sampah.
3. Penguatan Peran Satpol PP
Pengawasan oleh Satpol PP akan lebih diintensifkan untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, termasuk patroli rutin di lokasi rawan pembuangan liar.
4. Peningkatan Sarana Prasarana Dan Alokasi Dana
Pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pendukung, serta menggandeng sektor swasta seperti PT. Djarum untuk bantuan teknologi dan pendanaan.
5. Menambah Jumlah Sumber Daya Manusia di Bagian Persampahan
Penambahan personel baik di Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup ataupun Satuan Polisi Pamong Praja harus tetap dilakukan. Dengan kapasitas personel yang lebih banyak dan umur yang produktif, pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, mulai dari pengumpulan, 117 pengolahan, serta penegakan perda yang lebih tegas

Implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus sudah dimulai dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, keberhasilannya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran publik, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Penguatan pada keempat dimensi *Collaborative Governance* perlu terus dilakukan agar kolaborasi ini dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi nyata terhadap terciptanya ketertiban umum dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Kudus.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelaksanaan *collaborative governance* dalam tata kelola sampah guna menjaga ketertiban umum di Kabupaten Kudus. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta (seperti PT. Djarum), dan masyarakat, implementasi *collaborative governance* belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, elemen penting seperti *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* telah mulai diterapkan, namun masih menghadapi kendala yang signifikan. *Starting condition* menunjukkan bahwa ada ketimpangan kapasitas antar aktor, terutama dari sisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan kapasitas yang memadai dalam mengelola sampah. Selain itu, masih terdapat dominasi aktor tertentu, seperti pemerintah dan sektor swasta, dalam proses

pengambilan keputusan, yang menghambat partisipasi setara (Azami, 2018).

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus masih menghadapi tantangan signifikan, terutama rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Meskipun telah diterapkan berbagai program seperti Busadipah dan bank sampah unit desa, partisipasi warga dalam memilah dan mengelola sampah masih rendah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Daka (2020) di Lusaka, yang menunjukkan bahwa meskipun kolaborasi antar pemangku kepentingan sudah ada, sekitar 85% sampah tetap tidak terkelola akibat keterlibatan masyarakat yang minim dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kerangka teori collaborative governance dari Ansell dan Gash, penelitian ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi di Kudus masih cenderung bersifat top-down. Hal serupa ditemukan dalam studi Gunawan (2023) di Kota Malang, yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di sana lebih banyak bersifat simbolis dan belum sepenuhnya partisipatif. Ari menyarankan perlunya pergeseran ke arah *co-creation policy* agar terjadi kolaborasi substantif yang menyertakan masyarakat dan sektor informal secara aktif.

Beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM, lemahnya penegakan hukum, serta ketidaktepatan alokasi dana juga muncul sebagai penghambat di Kudus, yang sejalan dengan temuan Harmana et al. (2021) di Kota Tarakan. Di sisi lain, studi Ain et al. (2021) di Bali menekankan pentingnya kesadaran publik dan kepemimpinan fasilitatif dalam mendorong keberhasilan kolaborasi, sesuatu yang juga masih perlu diperkuat di Kudus.

Sebagai perbandingan positif, Desa Panggungharjo di Yogyakarta berhasil membangun model kolaborasi yang efektif melalui kepemimpinan desa, dukungan regulasi lokal, dan pembentukan unit pengelola sampah berbasis BUMDes. Kolaborasi ini tumbuh dari kepercayaan yang dibangun secara intensif antara pemerintah desa dan masyarakat, serta visi bersama mengenai “daulat sampah” Sulistyowati (2024). Sementara itu, di wilayah metropolitan seperti Jakarta, pendekatan kolaboratif diformalkan melalui model MAURITS yang menekankan transparansi, inovasi, dan keberlanjutan sebagai fondasi tata kelola modern Panjaitan et al. (2024).

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian tentang collaborative governance di tingkat daerah dengan menyoroti pentingnya membangun sinergi antaraktor lokal, memperkuat regulasi, serta mengedepankan kepemimpinan yang mampu memfasilitasi kepercayaan dan komitmen bersama. Konteks lokal dan kearifan budaya juga menjadi kunci yang membedakan keberhasilan pengelolaan sampah di berbagai daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait kolaborasi tata kelola sampah dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Kudus, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Kolaborasi dalam Tata Kelola Sampah untuk Menjaga Ketertiban Umum di Kabupaten Kudus

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus, sektor swasta (terutama PT. Djarum), dan masyarakat telah terwujud melalui berbagai program pengelolaan sampah seperti bank sampah, TPS 3R, serta edukasi dan kampanye pengurangan sampah. Model kolaborasi ini mengacu pada teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang melibatkan starting condition, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Namun, meskipun sudah terdapat

struktur kolaboratif, pelaksanaan di lapangan belum optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya koordinasi antar aktor dan rendahnya konsistensi dalam implementasi kebijakan.

2. Faktor Penghambat Kolaborasi dalam Tata Kelola Sampah di Kabupaten Kudus

Terdapat beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas kolaborasi, antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah; rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan membuang sampah secara benar; lemahnya koordinasi lintas sektor; serta ketidakseimbangan komitmen di antara para aktor yang terlibat. Selain itu, keterbatasan pendanaan dan kurangnya monitoring terhadap program juga turut memperparah kondisi pengelolaan sampah di wilayah ini.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Mengatasi Hambatan Kolaborasi Tata Kelola Sampah

Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya mengatasi berbagai hambatan melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan partisipasi masyarakat melalui program edukasi, pelibatan sektor swasta dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah, dan pengembangan program inovatif seperti Busadipah (*Buang Sampah Dibayar Sampah*). Di samping itu, langkah konkret seperti pemberian penghargaan kepada pelaku kolaborasi, penguatan kelembagaan di tingkat dinas, serta peningkatan kapasitas petugas kebersihan turut mendukung perbaikan tata kelola sampah secara bertahap.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal, yaitu di Kabupaten Kudus. Hal ini membatasi generalisasi temuan ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan berbeda. Kemudian adalah terkait keterbatasan waktu dan akses terhadap beberapa aktor kunci kolaborasi, seperti pihak swasta non-korporat atau kelompok masyarakat marginal, yang dapat menghambat kedalaman analisis hubungan antar pihak secara lebih menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Untuk pengembangan di masa mendatang, penelitian ini membuka ruang bagi studi komparatif antar daerah guna melihat variasi model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di wilayah dengan dinamika sosial-politik yang berbeda (Martomo, 2020). Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas kolaborasi secara lebih objektif terhadap indikator-indikator ketertiban umum, lingkungan, dan kesejahteraan Masyarakat (Kinasih, 2024). Selain itu, penelitian mendatang dapat lebih menitikberatkan pada dinamika internal antar aktor kolaborasi, seperti aspek kepemimpinan kolaboratif, mekanisme insentif, serta peran teknologi dan media dalam menguatkan partisipasi publik (Jonathan, 2004). Pengkajian secara longitudinal juga direkomendasikan untuk memahami perubahan dan keberlanjutan kolaborasi tata kelola sampah dari waktu ke waktu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan terutama kepada . Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Bapak Drs. Revlisianto Subekti serta Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, Bapak Drs. Abdul Halil beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan data penelitian bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si. atas segenap bimbingan dan arahnya selama penelitian ini dilaksanakan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Azami, M., & Wibawa, A. (2021). *Collaborative Governance in Managing Plastic Waste in Bali*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 905(1), 012115. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012115>
- Daka, M., & Madimutsa, C. (2020). *Collaborative Governance and Community Participation in Solid Waste Management in Lusaka*. *African Journal of Governance and Development*, 9(2), 524–542. <https://ajgd.journalofgovernance.com/index.php/ajgd/article/view/173>
- Gunawan, A. (2023). *Collaborative Governance in Urban Waste Management: Policy Evaluation of Malang City in the Post-Pandemic SDGs Era*. *PANGRIPTA*, 4(1). <https://doi.org/10.58411/qbxhb898>
- Harmana, Djogeh, Ella L. Wargadinata, Nurdin, Ismail.(2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Collaborative Governance di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13 (2) hlm. 247–260. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.430>
- Jonathan. (2004). Kerjasama dan Kolaborasi Menjadi Kunci Program Pendidikan Antar Negara. [https://edura.unj.ac.id/eduranews/?p=2234#:~:text=Jonathan%20\(2004\)%20mendefiniskan%20kolaborasi%20sebagai,antara%20beberapa%20orang%20yang%20berkesinambungan](https://edura.unj.ac.id/eduranews/?p=2234#:~:text=Jonathan%20(2004)%20mendefiniskan%20kolaborasi%20sebagai,antara%20beberapa%20orang%20yang%20berkesinambungan)
- Kinasih, R. (2024). *Pemerintah Perlu Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Mengelola Sampah Sendiri*. <https://ft.ugm.ac.id/pakar-ugm-pemerintah-perlu-membangun-kesadaran-kolektif-masyarakat-mengelola-sampah-sendiri/>
- Labolo, Muhadam. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu kajian, teori , konsep dan pengembangannya* (7th ed.). PT Rajacrafindo Persada.
- Martomo, Y. P. (2017). *Collaborative Governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairirs*. <http://repo.unsa.ac.id/10/1/Buku%20Monograf%20Fix.pdf>
- Muhilisin, A. (2023). *Pengelolaan TPA Tanjungrejo Amburadul, Sampah di Pasar Bitingan Terbengkalai KUDUS*. <https://betanews.id/2024/04/pengelolaan-tpa-tanjungrejo->

amburadul-sampah-di-pasar-bitingan-terbengkalai.html

Nuridin, I & Dra. Sri Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendekia.

Panjaitan, H. M., Djaenuri, H. M. A., Moenek, R., & Sinurat, M. (2024). *Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta*. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 11(4). <https://doi.org/10.54783/jv.v11i4.222>

Pantura, Jurnal. (2020). Limbah TPA Tanjungrejo Rusak Ratusan Tanaman. <https://jurnalpantura.id/limbah-tpa-tanjungrejo-rusak-ratusan-tanaman/>

Sulistyowati, F., Tyas, B. H., Puspitasari, C., & Widati, W. (2024). *Collaborative Governance untuk Daulat Sampah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(2), 132–143. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i2.4649>

Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus Policy Implementation Of Waste Management In Kudus Regency. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(2). Doi : [0.35329/jkesmas.v6i2.1880](https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880)

